

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk berwirausaha salah satu usaha yang banyak diminati yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan supaya dapat memajukan UMKM terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat diketahui dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi ekonomi di Indonesia. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, akan tetapi UMKM mampu bertahan di masa ini, UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM di Indonesia harus dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas produknya.¹UMKM merupakan kegiatan usaha yang berdiri sendiri serta mampu dalam menghasilkan produknya yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Banyak penduduk di Indonesia yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM di Indonesia juga didukung oleh pemerintah perbankan, lembaga keuangan dan masyarakat.²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹BKKBN Pusat."Pembangunan Keluarga Sejahtera Diindonesia". Jakarta:BKKBN,(1999) h.56

²Risnarningsih, R." Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept"dalam *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 41–50, (2017),h.95

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM di Indonesia (2017-2020)

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2017	62.199.606
2	2018	62.789.709
3	2019	63.278.562
4	2020	64.199.186

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UMKM (2017-2020)

Saat ini perkembangan UMKM tercatat lebih dari 64,2 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2017, tercatat ada 62,2 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga tahun 2018 tercatat 62,7 juta, pada tahun 2019 meningkat hingga 63,3 juta, hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup pesat tercatat dengan jumlah 64,2 juta UMKM. Dengan angka tersebut terbukti bahwa perkembangan UMKM berkembang pesat, besarnya minat masyarakat untuk berwirausaha atau mengembangkan usahanya kembali sebagai mata pencaharian sangatlah besar. Terbukti Kota Medan UMKM mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini disebabkan karena semakin banyak masyarakat yang mencoba membuka usaha sendiri, dengan modal yang mereka miliki. Perkembangan UMKM Kota Medan ditunjukkan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM Kota Medan

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2017	3.572
2	2018	3.598
3	2019	3.861
4	2020	4.125

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan (2017-2020)

Pertumbuhan UMKM di Kota Medan selama periode 2017 – 2020 menunjukkan berkembang dari tahun ke tahun. Pertumbuhan UMKM di Kota Medan pada tahun 2017 sebesar 3,4 ribu UMKM, Pada tahun 2018 pertumbuhan UMKM Kota Medan meningkat menjadi 3,6 ribu UMKM, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 3,8 ribu UMKM, hingga tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,2 ribu UMKM. Pemerintah mendorong UMKM untuk dapat lebih maju dan semakin berkembang. Tidak dapat dipungkiri jika pemerintah saat ini bersemangat untuk selalu memberikan penghargaan kepada UMKM yang telah menghasilkan produk dengan baik dan bermanfaat. Banyak UMKM yang mendapatkan binaan dari pemerintah. Kementrian Koperasi dan UMKM mengelompokkan UMKM menjadi 3 kelompok: usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi rakyat (Warga Negara Indonesia) berskala kecil, bersifat tradisional dan informal. Informal disini dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunnya paling banyak Rp 100.000.000. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang secara umum memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.³

Terdapat beberapa masalah yang seringkali terabaikan oleh pelaku bisnis UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Dampak dari pengabaian pengelolaan keuangan mungkin tidak

³Agnirizkita."Pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM Kecamatan Cinere, Depok". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol 2, Issue 1,(2020), h.58

terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut." Dalam melakukan pengembangan UMKM diperlukan dana yang besar serta harus terdapat pemisahan antara dana pribadi dan dana perusahaan, supaya dana pribadi tidak tercampur dengan dana kegiatan perusahaan.⁴ Untuk memperoleh dana yang besar maka UMKM harus bisa membuat laporan keuangan untuk mengatur keuangan pada kegiatan usahanya. Tetapi kenyataannya banyak dijumpai UMKM yang belum bisa atau belum menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. UMKM hanya berfokus pada kegiatan produksinya, sehingga tidak menganggap pembukuan dan pencatatan akuntansi itu penting. Sebagian pelaku UMKM beranggapan bahwa pembukuan dan pencatatan akuntansi itu sulit dan rumit. Proses penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan terutama pada kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akan tetapi kesadaran untuk proses pembuatan laporan keuangan masih sangat rendah dan belum mampu mengelola keuangannya dengan benar. Sehingga tak dapat dipungkiri jika banyak dijumpai UMKM yang gagal dalam menjalankan usahanya. Hal ini menjadi masalah utama bagi sebagian besar UMKM.⁵

Kegagalan usaha disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan khusus bagi pelaku UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan benar. Laporan keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan suatu usaha. Dengan memanfaatkan laporan keuangan pelaku usaha dapat membuat keputusan-keputusan tepat. Dengan keputusan yang tepat maka keberhasilan suatu usaha dapat ditingkatkan.⁶ Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adanya laporan keuangan juga harus diterapkan dalam kegiatan usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah yang sudah banyak dijalankan oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Adapun pengguna laporan keuangan antara lain: kreditor maupun investor. Pengelolaan keuangan penting dilakukan dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah

⁴Hariyono. "Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.76

⁵Weya, K., Areros, W. A., & Tumbel, T. M. "Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua" dalam *Jurnal Productivity*, 1(3), 267-273, (2020), h.67

⁶M. Tohar. "Membuka Usaha Kecil dan Menengah". (Jakarta: Kanisius, 2001), h. 24

(UMKM).⁷

Banyak dijumpai jika pelaku UMKM pada saat memperoleh keuntungan yang banyak, mereka tidak bisa membagi keuntungan secara setara untuk dikelola menjadi modal kembali. Lebih seringnya keuntungan yang diperoleh digunakan untuk keperluan pribadi. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan keuangan dalam kegiatan UMKM. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, maka pelaku UMKM bisa mengelola sumber modal dengan baik dan seksama. Sehingga jika ada pengeluaran bisa dipantau dengan jelas. Apabila UMKM mampu menerapkan pengelolaan keuangannya dengan baik maka UMKM dapat dikatakan berhasil dan bisa mempertahankan keberlanjutan usahanya di masa depan.

Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 yang selanjutnya disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. SAK EMKM memiliki tujuan untuk standarisasi laporan keuangan UMKM dan menjawab fenomena bahwa tidak semua UMKM dapat melaksanakan implementasi Standar sebelumnya yang di anggap menyulitkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).⁸

Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Standar ini terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini memudahkan entitas untuk menyusun laporan keuangan. Alasan pergantian dari SAK ETAP menjadi SAK EMKM adalah mayoritas entitas, mikro, kecil dan menengah di Indonesia sulit mendapatkan akses untuk ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. Meskipun SAK EMKM bisa dibilang sederhana, namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK EMKM tidak begitu saja dapat diterima oleh pihak UMKM, hingga saat ini masih banyak UMKM yang tidak menerapkan pembukuan yang sesuai standar. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai

⁷Anoraga Pandji, D. S. "*Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.45

⁸Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) "*Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, kecil dan menengah*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 52

standar, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis. Diharapkan dengan terus adanya sosialisasi dan pelatihan pencatatan akuntansi serta peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM. UMKM untuk kedepannya dapat membuat laporan keuangan dengan benar, sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mencapai akses bank dan pinjaman lainnya untuk mengembangkan usaha mereka.⁹

Kota Medan mempunyai banyak sekali industri UMKM dan perkembangannya relatif lebih besar dibandingkan daerah lainya di Sumatera Utara. Jumlah pelaku UMKM di kecamatan Medan Tembung yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM yaitu sebanyak 52 UMKM. Jenis usaha didominasi oleh usaha kuliner (toko kue, rumah makan, aneka minuman, keripik dan lainnya), usaha jasa (salon, londry, doorsmer), usaha dagang (grosir), dan usaha produksi (hijab, batik, penjahit, bordir dan lainnya). Bisnis kuliner di Kecamatan Medan Tembung merupakan contoh usaha UMKM yang tak kunjung sepi peminat. Jenis usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat bervariasi sehingga pebisnis dapat berinovasi dengan mengikuti segala tren yang ada. Pada dasarnya bisnis kuliner apa saja terbilang laku di Kecamatan Medan Tembung. Namun, karena konsumen terbesar yang akan ditarget adalah pekerja, mahasiswa, wisatawan dan lainnya, sebaiknya pertimbangkan membuka tempat makan yang menjual aneka kuliner khas setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Drs. Unggul Sitanggang, M.Si UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, terdaftar 52 pelaku UMKM disekitar daerah Kecamatan Medan Tembung. Berdasarkan riset yang dilakukan dari 10 UMKM di Kecamatan Medan Tembung yaitu 10 diantaranya belum memiliki laporan keuangan sama sekali mereka hanya memiliki catatan omset perhari setiap usaha masing-masing.¹⁰

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masih rendahnya sistem pencatatan keuangan pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung dan pentingnya akuntansi belum dipahami oleh pengusaha UMKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan sebagai salah satu bentuk

⁹Rias Tuti. "Fakto-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM" dalam *Towards a New Indonesia Business Anbitecture*, ISSN NO: 1978-6522, (2014),h. 158-159.

¹⁰Unggul Sitanggang, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, wawancara di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan tanggal 12 april 2022

penyampaian informasi akuntansi, para pemilik usaha dapat mengetahui bagaimana posisi serta kinerja keuangannya, tidak hanya itu pemilik usaha akan lebih mudah untuk menghitung pajak, karena laporan keuangan merupakan sumber data untuk menghitung pajak. Dalam menjalankan UMKM ini harus memiliki pencatatan agar para UMKM dapat menjalankan usahanya dengan optimal. Laporan Keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. UMKM perlu mempersiapkan beberapa buku untuk mencatat berbagai transaksi keuangan yang dilakukan sehingga lebih terkelola dan tertib administrasi keuangannya. Dan sebaiknya para UMKM harus mengetahui dan lebih memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku.¹¹

Alasan para UMKM tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum. Karyawan yang dimiliki tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai akuntansi. Yang mereka catat hanya uang masuk dan keluar, untuk setiap minggunya dilaporkan kepada pemilik UMKM dan tidak adanya pembagian tugas antara tiap bidang dalam pengelolaan UMKM. Sehingga kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tidak mendapat perhatian khusus. Kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO**

¹¹Adri Said & N. Ika Widjaja. "Akses Keuangan UMKM: Buku Panduan untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro dalam Konteks Pembangunan Daerah", *Jurnal Konrad Adenauer Stifting*,(2007),h. 54-55.

KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pengetahuan pemilik UMKM tentang akuntansi dalam menyediakan laporan keuangan.
2. Skala usaha yang kecil membuat pemilik usaha tidak menerapkan akuntansi dalam kegiatan usahanya.
3. Masih banyak UMKM di kota Medan belum teregistrasi dengan baik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan mempertimbangkan keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. Permasalahan yang diteliti dibatasi pada masalah Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Tembung. Batasan Masalah Penelitian mengenai pengelolaan keuangan ini mencakup penggunaan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang dilakukan oleh UMKM di Kecamatan Medan Tembung dan penerapan penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Tembung?
2. Bagaimana penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman UMKM terhadap pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Tembung
2. Untuk mengetahui penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap metode dan teori-teori dalam kajian ilmu tentang pengelolaan akuntansi, menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi peneliti dan bagi pembaca, dan digunakan sebagai

perbandingan dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian terhadap objek atau masalah yang sama dimasa yang akan datang bagi pengelola UMKM Sebagai masukan dan pertimbangan yang mungkin bisa dijadikan dasar pemecahan masalah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima dibangku kuliah, serta dapat membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi dilapangan. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu dan dipakai sebagai referensi bagi para peneliti lain serta dapat melanjutkan, dengan meneliti aspek-aspek lain yang belum tersentuh dan sebagai syarat lulus S.1 (Stara 1)

